



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025**





BUPATI SUMBA BARAT DAYA

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman, kita patut memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pengasih dan Penyayang, karena hanya atas perkenananNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 yang ditujukan kepada Presiden. Dalam LKIP, yang disampaikan adalah pertanggungjawaban kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 untuk mewujudkan sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 s/d 2029.

Penyusunan LKIP Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 ini dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik dari seluruh Perangkat Daerah (PD) dan Tim LKIP. Namun, dalam penyusunan LKIP ini masih terdapat banyak kekurangan, kendala, memenuhi standar LKIP yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan dalam Keputusan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kerangka pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kinerja untuk pemerintahan daerah, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 s/d 2029.

Sekian dan Terima Kasih.

Tambolaka, 20 Maret 2026

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

RATU NGADU BONNU WULLA,S.T

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 – 2029 bersama rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah berkomitmen untuk ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045***. Komitmen ini menjadi inspirasi yang membingkai arah kebijakan umum pembangunan daerah yakni pembangunan ekonomi kerakyatan dan pembangunan masyarakat.

Kebijakan tersebut di atas menjadi dasar dalam menyusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sumba Barat Daya di masa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, berbudaya, dan berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sumba Barat Daya yang Hebat, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045 Kabupaten Sumba Barat Daya menentukan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Pembangunan

1. Terjadi peningkatan volume dan mutu infrastruktur pedesaan yang meliputi jalan raya, sekolah, puskesmas, pustu, polindes, jaringan air dan irigasi;
2. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelaksanaan isu pokok, menunjukkan hasil yang signifikan, yakni:
 - a. Sebagian besar masyarakat desa sudah menikmati sarana air.
 - b. Sebaian besar desa sudah memiliki penerangan listrik.
 - c. Kondisi pangan masyarakat masih cukup aman.
 - d. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat cukup kondusif dan terkendali.

Apresiasi tersebut di atas, merupakan ekspresi dari hasil Kerja keras, kerja cerdas dan kerja pintar yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam usaha mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah.

B. Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan program dan kegiatan (termasuk kegiatan penunjang) dengan indikator sasaran. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 untuk mencapai 55 sasaran dari 55 sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 55 sasaran yang dilaksanakan adalah 55. Keberhasilan / kegagalan ini disumbangkan oleh 42 sasaran yang sangat berhasil mencapai 85%-100% atau lebih, 5 sasaran yang **berhasil** mencapai 70%-84%, 1 sasaran yang cukup berhasil mencapai 55%-69%. 7 Sasaran yang tidak berhasil mencapai < 50%. Dan terdapat Perincian keberhasilan / kegagalan sasaran-sasaran tersebut, dapat diikuti pada 4 tabel di bawah ini:

Tabel 1: Sasaran yang dikategorikan *Sangat Berhasil*:

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (85%-100%/lebih)
1	Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi publik	144,8 %
2	Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100,8%
3	Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	132%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UMKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan	166,4%
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa yang dilakukan melalui LPSE)	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	90%
7	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90,5%
8	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	135%
9	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Daerah	102%
10	Meningkatnya kunjungan wisatawan	95%
11	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

12	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	94,78%
13	Meningkatnya Jumlah dan Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh intrvensi pemberdayaan sosial sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi yang berkelanjutan	100%
14	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis melalui layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	100%
15	Meningkatnya keberfungsian sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA) melalui layanan rehabilitasi sosial berbasis kelurgadan masyarakat di luar panti sosial	100%
16	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial melalui layanan perlindungan sosial yang cepat, tepat, dan terkoordinasi di tingkat kabupaten/kota	100%
17	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan awal bencana di tingkat kabupaten/kota	100%
18	Terwujudnya data fakir miskin yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyaluran program kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten/kota	100%
19	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	30,98,7%
20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	89,50%
21	meningkatkan produk hukum yang berkualitas	100%
22	Meningkatnya pengkajian produk Hukum dan pengelolaan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	100%
23	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	96%
24	Meningkatnya toleransi antar umat beragama	92%
25	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif, Dan Profesional	88,40%
26	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta partisipasi peserta didik	89,9%

27	meningkatnya PDRB industry pengolahan dan perdagangan	100%
28	Meningkatnya Tenaga Kerja/yang memperoleh pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	127%
29	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Kondusif	100%
30	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Transmigrasi	100%
31	Meningkatnya Kualitas SDM di Kawasan Transmigrasi	100%
32	Meningkatnya Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi	100%
33	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Sitim Informasi Daerah	93,63%
34	Meningkatkan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dalam kehidupan masyarakat	99%
35	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini didaerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Kab. Sumba Barat Daya	100%
36	Meningkatnya Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di Kab.Sumba Barat Daya	99%
37	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik	95,91%
38	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	91%
39	Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing	99,90%
40	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	97,42%
41	Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi publik	287,7%

Tabel 2: Sasaran yang dikategorikan **Berhasil**

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (70%-84%)
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aksebilitas, Konektivitas dan Fasilitas Wilayah dalam daerah	83,98%
2	Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi layak serta sesuai dengan tata ruang wilayah	84,97%
3	Meningkatnya jaringan listrik dan elektrifikasi	71%
4	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	83,83%
5	Meningkatnya Usaha Mikro	80%

Tabel 3: Sasaran yang dikategorikan **Cukup Berhasil**

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (55%-69%)
1	Succes Rate Pengobatan TBC	55,42%

Tabel 3: Sasaran yang dikategorikan *Tidak berhasil*

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (55%-69%)
1	Menurunnya jumlah Stunting	20%
2	Menurunnya Angka Kematian Bayi	-75%
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu	-132%
4	Menurunnya API (Annual Parasite Incidence)	0,67%
5	Meningkatnya akses transportasi pada pusat permukiman	48,8%
6	Meningkatnya Jumlah Koperasi	53,57%
7	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan	54%

Keberhasilan sasaran-sasaran pada tabel 1 dan 2 tersebut di atas, secara umum disebabkan yaitu :

1. Perencanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut menjadi prioritas pada tahun 2025
2. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut taat azas efisiensi dan efektivitas
3. Meningkatnya kualitas disiplin dan etos kerja aparatur pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
4. Meningkatnya kualitas pengawasan atau pengendalian dari pimpinan, instansi berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran pada table 3 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber pembiayaan dalam mendukung perencanaan program dan kegiatan sehingga tidak terlaksana secara optimal
2. Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur pegawai, baik kuantitas maupun kualitas, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan atau stagnasi dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sehingga operasionalisasi kerja aparatur pegawai kurang optimal untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan dan kurang berhasil pencapaian sasaran-sasaran tersebut ke depan yaitu :

1. Perencanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, perlu dikendalikan secara baik melalui asistensi dengan mengacu pada pencapaian kinerja-kinerja sebelumnya dan kapasitas daya dukung aparatur yang ada, sehingga taat asas efisiensi dan efektivitas.
2. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja aparatur pegawai.
4. Perlu regulasi dan kebijakan pimpinan uji kelayakan dan kepatuhan/fit and propertest untuk memotivasi jabatan II, yang mengatur adanya *Penghargaan dan Penghukuman* bagi para pimpinan Perangkat Daerah (PD) yang mencapai kinerja *Berhasil dan Tidak Berhasil*, sehingga terjadi kompetisi antar-PD untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut.
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tambolaka, 20 Maret 2026

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

RATU NGADU BONNU WULLA,S.T

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sumba Barat Daya yang relatif muda pada usia Delapan Belas tahun setelah mekar dari Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2007 dan menjadi salah satu dari 22 kabupaten/kota madya dalam wilayah administratif pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan kontribusi pelayanan secara maksimal dan memadai untuk menyamakan dirinya dengan kabupaten lain, bahkan kalau boleh dikatakan cukup melejit pesat bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami proses pemekaran pada saat yang sama.

Sumba Barat Daya memiliki semboyan ***Loda Wee Maringi Pada Wee Malala*** yang meliputi 11 (sebelas) wilayah kecamatan yang terdiri dari 173 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan – kecamatan dimaksud adalah Kodi Balaghar, Kodi Bangedo Kodi, Kodi Utara, Kota Tambolaka, Loura, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Tengah, Wewewa Timur, Wewewa Utara. Secara geografis memiliki luas wilayah daratan 1.382,84 km², kesebelas kecamatan tersebut meliputi wilayah pesisir maupun dataran tinggi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kecamatan Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kodi, dan Kodi Utara merupakan wilayah yang berada dibagian barat daya dengan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan laut dan memiliki potensi sumber daya pesisir. Sementara itu Kecamatan Wewewa Utara, Wewewa Selatan, Wewewa Tengah, Wewewa Timur dan Wewewa Barat mencakup wilayah pedalaman yang didominasi dengan topografi perbukitan. Sedangkan Kecamatan Loura serta Kota Tambolaka merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan Pemerintahan, dimana Kota Tambolaka telah ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Sumba Barat Daya dan sekaligus sebagai pusat pelayanan publik. panjang garis pantai 95,75 km dan luas perairan 73.262,65 ha. . Keadaan iklim Kabupaten Sumba Barat Daya musim kemarau 3-4 bulan yaitu pada Bulan Juni sampai dengan September dan musim hujan 4 bulan yaitu pada Bulan Desember sampai dengan Bulan Maret bulan. Temperatur rata-rata Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya berkisar antara 21°C – 34 °C.

Jumlah penduduknya, berdasarkan data, keadaan 2025, sebesar 335.500 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 163.987 Jiwa dan perempuan sebanyak 171.513 jiwa . Mata pencaharian utama masyarakat yakni petani (70 %).

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yakni menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan membina pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok dan fungsi ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UU) 1945 dan *Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah Kabupaten, diambil kembali dan diserahkan kepada provinsi untuk melaksanakannya dan beberapa kewenangan kembali kepada Pusat.

Hal ini menjadikan rentang kendali untuk mengintervensi dan mengendalikannya menjadi lebih panjang. Namun demikian, dalam konteks NKRI, dipandang dari hal yang positif, bahwa kewenangan yang dialihkan tersebut menjadi lebih baik jika dilaksanakan oleh Provinsi atau Pusat dengan Sumber Daya yang lebih memadai yang dimilikinya dan fungsi koordinatif yang lebih besar serta bersifat lintas Kabupaten/Kota dan Lintas Provinsi.

Pada pelaksanaan di tingkat Kabupaten, perlu diatur ulang untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, kemampuan melaksanakan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari apabila dilaksanakan audit kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dukungan Pemerintah Pusat tersebut dimaksudkan untuk menciptakan otonomi daerah yang kuat. Namun demikian, demi terwujudnya otonomi daerah yang bertanggung jawab, pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi harus tetap mengacu dan sejalan dengan arah kebijakan dan program pembangunan pada aras nasional (dan juga provinsi).

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah tersebut di atas, mutlak dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat baik langsung maupun melalui Pemerintah Provinsi. Instrumen sebagai media pertanggungjawaban, dilegitimasi melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Dasar acuan dalam penyusunan LKIP adalah Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab I Ayat 11, disebutkan Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sedangkan Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana dimaksud paling sedikit menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian target kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program dengan tahun berjalan dengan target kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Daerah.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. LKIP ini menggambarkan kinerja yang dicapai, berhasil atau gagal, atas pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai Rencana Strategis Kabupaten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP juga dapat merupakan sarana untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sehingga kinerja yang dicapai lebih berdayaguna dan berhasil guna.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat penyusunan LKIP, sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permen PAN-RB 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Organisasi Perangkat Daerah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana beberapa urusan yang selama ini menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dialihkan menjadi Urusan Provinsi dan Pusat. Peralihan kewenangan ini ditindaklanjuti dengan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (Pasal 404, UU 23/2014).

Perubahan yang terjadi ini berdampak kepada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2025-2029, yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.

Penanggung jawab program mengalami perubahan akibat adanya perubahan kelembagaan karena beberapa perangkat daerah yang urusannya sudah menjadi kewenangan Pusat/Provinsi dilakukan penghapusan atau penggabungan dengan perangkat daerah yang lainnya, serta adanya pembentukan perangkat daerah baru untuk melaksanakan optimalisasi fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai implikasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Terkait hal-hal tersebut, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, untuk menyesuaikan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten saat ini, terkait pembentukan perangkat daerah (yang lama dan yang baru), program yang dilaksanakan, serta target kinerja pembangunan yang ditetapkan.

Reviu terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029, dilaksanakan melalui kajian terhadap beberapa kebijakan yang berkaitan dengan regulasi perencanaan dan penganggaran yang berlaku saat ini, telaahan terhadap batang tubuh RPJMD (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator Kinerja serta perangkat daerah penanggung jawab) untuk mengetahui keselarasan dan kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan untuk melaksanakan dan mencapai target kinerja pembangunan.

Regulasi penjabaran dari Undang-undang 23 Tahun 2014, baru ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan perumpunan urusan yang menjadi acuan dalam pembentukan perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Implikasi dari

pembentukan perangkat daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, terdapat Urusan yang sudah tidak dilaksanakan lagi oleh perangkat daerah yang lama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, yaitu : Urusan Kelautan, Urusan Kehutanan dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga dihilangkan dan penggabungan perangkat daerah sesuai perumpunan yang diarahkan dengan mengacu kepada hasil pemetaan urusan pemerintahan dan jenis, kriteria serta tipologi Perangkat Daerah.

Adanya perubahan kebijakan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah ini, memerlukan revisi terhadap dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, khususnya yang berkaitan dengan perangkat daerah penanggung jawab program, dan target kinerja pembangunan yang terukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dan sudah tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengintegrasikannya melalui program yang dilaksanakan, sehingga penganggaran pembangunan lebih difokuskan kepada program dan target kinerja yang menjadi kewenangan daerah, sementara itu untuk pencapaian target kinerja yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat akan dikoordinasikan melalui forum-forum perencanaan dan penganggaran tingkat Provinsi dan Pusat agar dapat tetap berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

- a. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
- b. Dinas terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 4) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 5) Dinas Pariwisata;
 - 6) Dinas Perikanan;
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan Perijinan dan terpadu Satu Pintu ;

- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 10) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 12) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup;
- 15) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 16) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 17) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 19) Dinas Sosial;
- 20) Dinas Perhubungan;
- 21) Dinas Pemadam dan Kebakaran
- 22) Inspektorat;
- 23) Satuan Polisi Pamong Praja;

c. Badan terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida);
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
- 3) Badan Pendapatan Daerah;
- 4) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

d. Unit-Unit Otonom, dibawah koordinasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- 1) Bagian unit terdiri dari:
 - (1) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - (3) Bagian Hukum;
 - (4) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - (5) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - (6) Bagian Umum;
 - (7) Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - (8) Bagian Organisasi;
 - (9) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 2) Kecamatan unit terdiri dari :
 - (1) Kecamatan Kota Tambolaka;
 - (2) Kecamatan Loura;
 - (3) Kecamatan Kodi;
 - (4) Kecamatan Kodi Bangedo;
 - (5) Kecamatan Kodi Utara;
 - (6) Kecamatan Blaghar;
 - (7) Kecamatan Wewewa Timur;
 - (8) Kecamatan Wewewa Utara;
 - (9) Kecamatan Wewewa Tengah;
 - (10) Kecamatan Wewewa Barat;
 - (11) Kecamatan Wewewa Selatan.

- 3) Kelurahan unit terdiri dari:
 (1) Kelurahan Waitabula;
 (2) Kelurahan Langga Lero.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Sampai dengan Bulan Desember 2025, keadaan pegawai yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Menurut latar belakang pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah orang		TOTAL
		PNS	PPPK	
1	Sarjana S2	50	46	96
2	Sarjana S1	1.891	1.132	3.026
3	Diploma 3	698	142	840
4	Diploma 2 & 1	115	0	115
5	SLTA	306	33	339
6	SLTP	12	0	12
7	SD	6	0	6
	Total seluruh	3.078	1.356	4.434

- b. Menurut golongan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah orang		TOTAL
		PNS	PPPK	
1	Golongan IV	395	0	395
2	Golongan III	2.032	0	2.302
3	Golongan II	371	0	371
4	Golongan I	10	0	10
5	Golongan X		45	45
6	Golongan IX		1.136	1.136
7	Golongan VII		142	142
8	Golongan V		33	33
7	Tenaga Kontrak			
	Total seluruh	3.078	1.356	4.434

- c. Menurut Diklat Penjurangan dan Perencanaan yang diikuti tahun 2025:

No	Diklat Penjurangan	Jumlah (Orang)
1	Pim II	1
2	Pim III	2
3	Pim IV	-

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai daerah otonom baru telah dan sedang melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana strategis, baik untuk kebutuhan perkantoran dan pelayanan umum.

a. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran yang disampaikan disini terbatas pada keadaan kendaraan operasional dan gedung kantor, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Kendaraan	
	a. Roda Empat	273
	b. Roda Dua	916
2	Gedung	
	a. Kantor kabupaten	35
	b. Kantor kecamatan	11
	c. Kelurahan	2

b. Sarana Pelayanan Umum

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Gedung	
	a. Pasar	16
	b. Puskesmas	16
	c. Poskesdes	48
	d. Polindes	41
	e. Pustu	49
	f. Posyandu	586
2	Jalan Raya	
	a. Jalan Negara	37,20
	b. Jalan Provinsi	83,07
	c. Jalan Kabupaten	1136,31
3	Dermaga	2 unit
4	Bandar Udara	1 unit

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Bagian Organisasi, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran serta rencana Anggaran Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 – 2029 yakni :

“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”.

2. Pernyataan Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 - 2029, yakni :

- a. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan
- b. Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
- c. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- d. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
- f. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup
- g. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik

3. Penetapan Tujuan

Tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

- a. Misi ***“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan”*** dengan tujuan : mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
- b. Misi ***“Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan”*** dengan tujuan : memberikan pelayanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui

program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

- c. Misi **“Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat”** dengan tujuan : memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mengupayakan penyediaan tenaga medis yang berkualitas sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
- d. Misi **“Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat”** dengan tujuan : mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui penyediaan pelatihan, bantuan modal usaha, dan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- e. Misi **“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur”** dengan tujuan : melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta perekonomian local.
- f. Misi **“Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup”** dengan tujuan : melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan pengurangan dampak negative pembangunan terhadap lingkungan.
- g. Misi **“Meningkatkan Pelayanan Publik”** dengan tujuan : meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mempercepat proses birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

h. **Penetapan Sasaran**

Terdapat perubahan terhadap sasaran, khususnya terkait dengan kalimat yang mengindikasikan adanya kewenangan yang sudah dialihkan kepada pemerintah Provinsi dan Pusat. Perubahan sasaran RPJMD dilakukan pada table keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.

Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

NO	SASARAN
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Akseibilitas, Konektivitas dan Fasilitas Wilayah dalam daerah
3	Menurunnya jumlah Stunting
4	Menurunnya Angka Kematian Bayi
5	Menurunnya Angka Kematian Ibu
6	Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional
7	Succes Rate Pengobatan TBC
8	Menurunnya API (Annual Parasite Incidence)
9	Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi layak serta sesuai dengan tata ruang wilayah
10	Meningkatnya jaringan listrik dan elektrifikasi
11	meningkatkan produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan
12	Meningkatnya akses transportasi pada pusat permukiman
13	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UMKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan
14	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa yang dilakukan melalui LPSE)
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
17	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
18	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Daerah
19	Meningkatnya ketersediaan Akseibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan
20	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
21	Meningkatnya kunjungan wisatawan
22	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

23	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
24	Meningkatnya Jumlah Koperasi
25	Meningkatnya Usaha Mikro
26	Meningkatnya Jumlah dan Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh intrvensi pemberdayaan sosial sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemandirian social ekonomi yang berkelanjutan
27	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis melalui layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti social
28	Meningkatnya keberfungsian sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya (bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA) melalui layanan rehabilitasi social berbasis keluargadan masyarakat di luar panti sosial.
29	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial melalui layanan perlindungan sosial yang cepat, tepat, dan terkoordinasi di tingkat kabupaten/kota
30	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan awal bencana di tingkat kabupaten/kota.
31	Terwujudnya data fakir miskin yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyaluran program kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten/kota.
32	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan
34	meningkatkan produk hukum yang berkualitas
35	Meningkatnya pengkajian produk Hukum dan pengelolaan dokumentasi produk hukum yang berkualitas.
36	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
37	Meningkatnya toleransi antar umat beragama
38	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif, Dan Profesional
39	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta partisipasi peserta didik.
40	meningkatkan PDRB industry pengolahan dan perdagangan.
41	Meningkatnya Tenaga Kerja/ yang memperoleh pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
42	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan
43	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Kondusif
44	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Transmigrasi
45	Meningkatnya Kualitas SDM di Kawasan Transmigrasi

46	Meningkatnya Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi
47	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Sistem Informasi Daerah
48	Meningkatkan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dalam kehidupan masyarakat
49	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Kab. Sumba Barat Daya.
50	Meningkatnya Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di Kab. Sumba Barat Daya. SB
51	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik
52	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
53	Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing
54	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
55	Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi publik

Rencana Anggaran

Rencana Anggaran Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat Daya pada Tahun 2025
sebesar Rp. **900.673.341.758,98**, terdiri
dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Pegawai	437.603.737.180,98
2	Belanja Barang dan Jasa	346.393.886.999,00
3	Belanja Modal	116.675.717.579,00
J u m l a h		900.673.341.758,98

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. PENETAPAN KINERJA

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, melalui penyelarasan RKT dan PK 2025 dengan Perubahan Anggaran tahun 2025.

3. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut :

No	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

4. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025, sebagai berikut

Sasaran 1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 144,8 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 2 Kegiatan dengan 1 sasaran dan 2 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	100	100	100
2	Pembudayaan gemas membaca tingkat daerah	100	89,45	89,45
	Rata-rata	100	144,8	144,8

Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aksebilitas, Konektivitas dan Fasilitas Wilayah dalam daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 83,98 % dengan predikat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 2 Kegiatan dengan 1 sasaran dan 5 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	54,30	33,64	61,93
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	63,40	33,80	53,31
3	Persentase jalan strategis desa dalam kondisi baik (>40 km/jam)	16,60	16,60	100
4	Cakupan bangunan strategis daerah dalam kondisi lengkap	44,00	47,00	106,82
5	Persentase jembatan dalam kondisi baik (KM)	82,80	81,00	97,83
	Rata-rata			83,98

Sasaran 3: Menurunnya jumlah Stunting

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 20 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prevalensi Stunting	18,8%	38,6	20%
	Rata-rata	18,8%	38,6	20%

Sasaran 4: Menurunnya Angka Kematian Bayi

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai -75 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Dayamenetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya Angka Kematian Bayi	0	7,5	-7,5
	Rata-rata	0	7,5	-7,5

Sasaran 5: Menurunnya Angka Kematian Ibu

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai -132 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Kematian Ibu	0	132	-132
	Rata-rata	0	132	-132

Sasaran 6: Kebersertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100,8 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebersertaan JKN	41.096	41.408	100,8
	Rata-rata	41.096	41.408	100,8

Sasaran 7: Succes Rate Pengobatan TBC

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 55,42 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengobatan tuberkolosis	987	547	55,42
	Rata-rata	987	547	55,42

Sasaran 8: Menurunnya API (Annual Parasite Incidence)

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 0,67 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengobatan tuberkolosis	< 1/1.000 penduduk	6,8/1.000 penduduk	0,67%
	Rata-rata	< 1/1.000 penduduk	6,8/1.000 penduduk	0,67%

Sasaran 9: Meningkatkan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi layak dan system drainase yang sesuai dengan tata ruang wilayah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 84,97 % dengan predikat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan menetapkan 4 indikator kinerja pencapaian sasaran, Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase penduduk berakses air	26,20	26,47	101,03

	minum (SPM)			
2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SPM)	74,60	74,10	99,33
3.	Persentase drainase dalam kondisi baik	44,50	38,87	87,35
4.	Rasio bangunan ber –IMB/PBG per satuan bangunan	0,008	0,0035	43,75
5.	Ketaatan terhadap RTRW	43,00	34,78	80,88
6.	Ketaatan terhadap RDTR	70,00	68,23	97,47
	Rata-rata			84,97

Sasaran 10: Meningkatnya jaringan listrik dan elektrifikasi

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 71 % dengan predikat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan menetapkan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran , Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rasio elektrifikasi	71,3	50,80	71%
	Rata-rata	71,3	50,80	71%

Sasaran 11: meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 132,6 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 Program dan 2 kegiatan dengan menetapkan 3 indikator kinerja Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Produksi perikanan tangkap(ton)	1.680	2.013	120
2.	Produksi perikanan budidaya (ton)	692	840,484	121
3.	Produksi garam (ton)	5	623,700	12,474
	Rata-rata	792	1.050,4	132,6

Sasaran 12: Meningkatnya akses transportasi pada pusat permukiman

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 48,8 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Dayamenetapkan 1 Program, 3 Kegiatan dengan 8 indikator dan 1 sasaran kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No .	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	85	61	71,8
2	Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dibangun	0	0	0
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	584,454	0	0
4	Rasiom Ijin Trayek	100	0	0
5	Jumlah Uji KIR angkutan Umum	703	0	0
6	Jumlah angkutan darat yang melaksanakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan (unit)	8400	0	0
7	Cakupan Kepemilikan KIR angkutan umum	40	0	0
8	Cakupan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	95	0	0
	Rata-rata	125	61	48,8%

Sasaran 13: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UMKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 166,4 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 12 Program, 31 Kegiatan, dengan 16 indikator pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No .	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa yang dilakukan melalui LPSE	100	100	100
2	Persentase kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian	3,67	3,67	100

3	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	79,13	79,13	
4	Peningkatan produksi tanaman pangan : - Padi - Jagung	94,630 137,511	94,630 137,511	100
5	Cakupan bina kelompok tani	9,17	9,17	100
6	Cakupan pengendalian organism pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	75	75	100
7	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41	41	100
8	Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan	1 unit	1 unit	100
9	Penyediaan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	65 kelompok tani	65 kelompok tani	100
10	Tersedianya dokumen pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi	2 dokumen	2 dokumen	100
11	Populasi ternak besar	20.582 ekor	18.295	88,71
12	Populasi ternak kecil	81.310 ekor	56.185	56,185
13	Populasi unggas	206.020 ekor	139.994	67,95
14	Kawasan peternakan fungsional(pengawasan)	25 kawasan	1 kawasan	0,04
15	Cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	80	60	75
16	Cakupan bina kelompok ternak	100	100	100
	Rata-rata	30,89	51,4	166,4

Sasaran 14: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa yang dilakukan melalui LPSE)

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 Program, 7 Kegiatan, 11 Sub Kegiatan dengan 1 indikator pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025	%
----	-------------------	------------	---

		Target	Realisasi	Pencapaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa yang dilakukan melalui LPSE	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100

Sasaran 15: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 90 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 Program, 8 Kegiatan dengan 5 dengan indikator, sasaran kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan secara terpadu	100	90	90
	Rata-rata	100	90	90

Sasaran 16: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 90,5 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan dengan menetapkan 1 indikator kinerja. Pencapaian target kinerja tampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	100	90,5	90,5
	Rata-rata	100	90,5	90,5

Sasaran 17: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 135 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program, 1 Kegiatan dengan 1 indikator

kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase PAD terhadap pendapatan	3,67	4,99	135
	Rata-rata	3,67	4,99	135

Sasaran 18 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai **102 %** dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 Program dan 4 kegiatan dengan 3 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		%Pencapaian target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemutakhiran data kepegawaian	93,6	100	106
2	Persentase jumlah pengadaan pejabat PT/PA/PP yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	100	100
3	Persentase PNS yang mengikuti diklat	100	100	100
	Rata-rata	97,9	100	102

Sasaran 19: Meningkatnya ketersediaan Akseibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai **95 %** dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, ditetapkan 1 Program dan 2 kegiatan dengan 4 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditangani	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keamanan)	100	95	95
3	Cakupan Penegakan Perda %	100	85	85

4	Terbentuknya secretariat PPNS	1 sek	1 sek	100
	Rata-rata	100	93,33	95

Sasaran 20: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 83,83 % dengan predikat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 9 (sembilan) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	2,93	2,93	100
2	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
3	Cakupan keluarga tersosialisasi terkait peningkatan kualitas kerja	0,33	0,33	100
4	Tersedianya dokumen data gender dan anak	0	0	0
5	Cakupan forum anak	16	16	100
6	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
7	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,84	0,64	76,19
8	Total fertility Rate (TFR)	3,44	2,54	73,84
9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR15-19)	30,08	28,08	93,35
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	40,04	38,26	95,55
11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	23	20	86,95
12	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	80	60	75
13	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	27,27	24,27	88,90
	Rata-rata			83,83

Sasaran 21 : Meningkatnya kunjungan wisatawan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 94,78 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 5 Program 9 Kegiatan, 26 Sub kegiatan dengan 4 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Jumlah Pengembangan lokasi pariwisata	58	41,67	71,84
2	Persentase peningkatan arus kunjungan wisatawan			
3	Cakupan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dan produk ang mendapatkan perlindunginya hak kekayaan intelektual	16.037	13.127	81,85
4	Persentase ketersediaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	20	20

Sasaran 22 : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 287,7 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kegiatan dengan menetapkan 1 indikator kinerja Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Konten dan perencanaan Media komunikasi Publik	100	97	97
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100	99	99
3	Relasi media		91,70	91,70
	Rata-rata	100	287,7	287,7

Sasaran 23 : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas

Kinerja Sasaran ini mencapai 97,42 % dengan predikat *sangat berhasil*. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 4 Program dan 10 kegiatan dengan 6 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks kualitas pelayanan public	100	97,42	97,42
	Rata-rata	100	97,42	97,42

Sasaran 24 : Meningkatnya Jumlah Koperasi

Kinerja Sasaran ini mencapai 53,57 % dengan predikat tidak *berhasil*. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 5 Program dan 5 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cakupan Bina Koperasi/Usaha Simpan Pinjam (%)	56	30	53,57
	Rata-rata	56	30	53,57

Sasaran 25 : Meningkatnya Usaha Mikro

Kinerja Sasaran ini mencapai 80 % dengan predikat *berhasil*. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 2 Program dan 2 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	200	160	80
	Rata-rata	200	160	80

Sasaran 26 : Meningkatnya Jumlah dan Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh intrvensi pemberdayaan sosial sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemandirian social ekonomi yang berkelanjutan

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh intervensi pemberdayaan sosial (kelompo/lokasi)	256	256	100
2	Pesentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh intervensi pemberdayaan social dari total KAT terdata (%)	100	100	100
	Rata-rata	178	178	100

Sasaran 27 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi social penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis melalui layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah peserta pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar diluar pasti sosial (orang)	268	268	100
2	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dluar pasti sosial dari total PPKS terdata (%)	100	100	100
	Rata-rata	318	318	100

Sasaran 28: Meningkatnya keberfungsian sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA) melalui layanan rehabilitasi sosial berbasis keluargadan masyarakat di luar panti sosial.

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah peserta pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar diluar pasti sosial (orang)	125	125	100
2	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dluar pasti sosial dari total PPKS terdata (%)	100	100	100
	Rata-rata	175	175	100

Sasaran 29 : Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial melalui layanan perlindungan sosial yang cepat, tepat, dan terkoordinasi di tingkat kabupaten/kota.

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah korban bencana yang memperoleh layanan perlindungan sosial	500	500	100
2	Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan Dasar (%)	100	100	100
	Rata-rata	300	300	100

Sasaran 30 :Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan awal bencana di tingkat kabupaten/kota.

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan awal bencana	20	20	100%
2	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100
	Rata-rata	60	60	100

Sasaran 31 : Terwujudnya data fakir miskin yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyaluran program kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten/kota.

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 3 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi	86.923	86.923	100%
2.	Persentase data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi%	100%	100%	100%
3.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	62.471	62.471	100%
	Rata-rata	107	107	100

Sasaran 32: Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 3098,7 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 3 Program dan 4 kegiatan dengan 7 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perekaman KTP Elektronik	97,84%	97,275	99,41
2	Persentase kartu identitas anak (KIA) yang diterbitkan	15,29%	12,36%	80,84
3	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	42,16%	47,85%	113,51
4	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	8,41%	31,41%	373,53
5	Persentase akte perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	43,65%	10,36%	23,74
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	0,07%	14,63%	20905,92

	kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	1	1	100
	Rata-rata			3098,7%

Sasaran 33 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan

Kinerja sasaran ini mencapai 89,50 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 program dan 3 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya Resiko Bencana	100	89,50	89,50
	Rata-rata	100	89,50	89,50

Sasaran 34 : meningkatnya produk hukum yang berkualitas

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hokum dan selesai tepat waktu. Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan oleh pemerintah provinsi dan pemetintah pusat.	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100

Sasaran 35 : Meningkatnya pengkajian produk Hukum dan pengelolaan dokumentasi produk hukum yang berkualitas.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100

Sasaran 36 : Meningkatnya Pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kinerja sasaran ini mencapai 96 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan 1 sasaran dan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi)	80	77	96
	Rata-rata	80	77	96

Sasaran 37 : Meningkatnya toleransi antar umat beragama

Kinerja sasaran ini mencapai 92 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 program dan 11 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pelayanan Keagamaan	100	92	92
	Rata-rata	100	92	92

Sasaran 38 : Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif, Dan Profesional

Kinerja sasaran ini mencapai 88,40 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 6 program dan 16 kegiatan dengan 9 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	69,19	77,95	113
2	Cakupan Desa yang terfalsifikasi penataan Desa sesuai dengan regulasi	100	100	100
3	Persentase kerjasama pembangunan kawasan perdesaan yang terfalsifikasi	50	0	0
4	Persentase pemerintahan Desa dengan administrasi yang baik	86,71	86,71	100
5	Persentase perkembangan desa yang baik	32,79	37,57	114,6
6	Rata-rata kelompok binaan PKK	34,10	0	0
7	Persentase PKK aktif	100	100	100
8	Persentase Posyandu aktif	100	100	100
9	Persentase Desa dengan kader dan pendamping Desa yang mampu dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi pembangunan desa	64,20	46,79	72,9
10	Cakupan pelaksanaan tugas komunikasi pimpinan	100	96	96
11	Cakupan pelaksanaan keprotokolan	100	94	94
12	Cakupan pendokumentasian tugas pimpinan	100	99,55	99,6
	Rata-rata	84,5	74,7	88,40

Sasaran 39: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta partisipasi peserta didik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 89,9 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 3 Program dan 17 Kegiatan dengan 8 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kemampuan literasi SD	40,34	33,53	83
2	Kemampuan numerasi SD	35,51	37,92	106,8
3	Kemampuan literasi SMP	53,51	48,28	90
4	Kemampuan numerasi SMP	49,8	34,07	69,44
5	Angka partisipasi murni SD (APM)	64,56	78,97	122,32
6	Angka partisipasi murni SMP (APM)	92,25	65,04	70,41
7	Rata-rata lama sekolah	7,39	6,47	88,67
8	PDRB ADHB sektor pengolahan	45,29	45,29	100
	Rata-rata	48,6	43,7	89,9

Sasaran 40: meningkatnya PDRB industry pengolahan dan perdagangan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDRB ADHB sektor pengolahan	45,29	45,29	100%
	Rata-rata	45,29	45,29	100%

Sasaran 41 : Meningkatnya Tenaga Kerja/ yang memperoleh pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 127 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1

Program dan 2 Kegiatan dengan 2 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah naker yang mendapat (%) pelatihan bersertifikat pada tahun n	96	135	140%
2	Jumlah Perusahaan Keci yang mendapat kosultasi peningkatan	82	80	97 %
	Rata -rata	137	175	127%

Sasaran 42 : Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 54 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 3 Kegiatan dengan 5 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	625	632	101,12%
2	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	12	0	0
3	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	25	31	124%
4	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	800	632	79%
5	Jumlah PMI Purna yang di berdayakan	5	-	0%
	Rata -rata	146	78,9	54%

Sasaran 43: Meningkatnya Hubungan Industrial yang Kondusif

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 2 Kegiatan dengan 3 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	1lap	1lap	100%
2	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	1 perkara	1 perkara	100%
3	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar BPJS Tenaga Kerja	5600	5600	100%
	Rata -rata	187	187	100%

Sasaran 44: Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Transmigrasi

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program, 1 Kegiatan dengan 1 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Lahan yang di cadangkan (ha)	250 ha	250 ha	100%
	Rata -rata	250 ha	250 ha	100%

Sasaran 45: Meningkatnya Kualitas SDM di Kawasan Transmigrasi

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program, 1 Kegiatan dengan 1 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah KK yang mengikuti Penyuluhan	100	100	100%
	Rata -rata	100	100	100%

Sasaran 46: Meningkatnya Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program, 1 Kegiatan dengan 2 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibangun	100	100	100%
2	Jumlah Satuan Pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 SP	1 SP	100%
	Rata –rata	200	200	100%

Sasaran 47 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Sistem Informasi Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 93,63 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program, 1 Kegiatan dengan 1 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pengelolaan Arsip	100	93,63	93,63
	Rata –rata	100	93,63	93,63

Sasaran 48 : Meningkatkan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dalam kehidupan masyarakat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 Program, 6 Kegiatan dengan 1 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pengurangan konflik SARA, persentase partisipasi masyarakat yang	100	99	99

	memiliki hak pilih dalam mengikuti pesta demokrasi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah			
	Rata –rata	100	99	99

Sasaran 49 : Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas social dan politik di Kab. Sumba Barat Daya.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 Program , 7 Kegiatan dengan 2 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada table berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks kinerja Ormas	100	100	100
2	Indeks Kewaspadaan Nasional	100	100	100
	Rata –rata	100	100	100

Sasaran 50 : Meningkatnya Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di Kab.Sumba Barat Daya

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program , 1 Kegiatan dengan 1 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks harmonisasi Indonesia di kabupaten Sumba Barat Daya	100	99	99
	Rata –rata	100	99	99

Sasaran 51: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95,91 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1

Program , 1 Kegiatan dengan 1 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase fasilitasi peran dan fungsi dewan	100	95,91	95,91
	Rata –rata	100	95,91	95,91

Sasaran 52 : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 91 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 4 Program , 12 Kegiatan dengan 3 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks pelayanan public (IPP)	51	39	76
2	Persentase instansi pemerintah dengan skor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	60,05	50,51	84
3	Indeks inovasi daerah (IID)	47,82	37,06	77
4	Persentase penyampaian laporan Keuangan tepat waktu	100	100	100
5	Persentase penambahan nilai aset tetap	8	10	125
	Rata –rata	43,3	39,5	91

Sasaran 53 : Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,90 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 5 Program , 5 Kegiatan dengan 4 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah dokumen yang	2 dok	2 dok	100%

	mendukung iklim penanaman modal yang kondusif			
2	Pembuatan video promosi penanaman modal	1 video	1 video	100%
3	Persentase penyelesaian permasalahan bidang penanaman modal	100	100	100
4	Jumlah perizinan dan non perizinan yang di keluarkan	2000 izin	1141 NIB	99,27
	Rata –rata			99,90

Sasaran 54 : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 90,74 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program , 6 Kegiatan dengan 2 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP (nilai SAKIP)	77	70	90,91
2	Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat (nilai SKM)	82	80	97,56
	Rata –rata			90,74

Sasaran 55 : Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi publik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95,7 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program , 1 Kegiatan dengan 3 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public	100	97	97
2	Pengelolaan media komunikasi public	100	99	99
3	Relasi media	100	91	91
	Rata –rata	100	95,7	95,7

